

Hingga Maret, APBN Jateng 2025 Surplus Rp 106,07 Miliar

Oleh: Tika Vilysta Editor: Marnisa Nurdian Saritri 02 May 2025 - 10:09



Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya saat rilis Assets Liabilities Committee(ALCo) secara daring, Kamis (1/5/2025). (Foto: DJPb Jateng)

KBRN, Semarang: Jawa Tengah berhasil mencatatkan surplus APBN sebesar Rp 106,07 miliar hingga Maret 2025. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya menyebut, kinerja itu menunjukkan hasil positif dan memberikan sinyal optimis terhadap ketahanan fiskal regional.

Hal itu diungkapkan Bayu saat rilis Assets Liabilities Committee(ALCo) secara daring, Kamis (1/5/2025). Menurutnya, capaian ini menjadi indikasi pengelolaan fiskal yang efisien serta menambah ruang fiskal untuk mengantisipasi dinamika ekonomi ke depan.

Ia menjelaskan, penerimaan negara tercatat Rp 26,44 triliun (20,43%) dari target. Sementara, belanja negara tercatat Rp 26,34 triliun(25,21%).

“Kontributor utama penerimaan berasal dari sektor perpajakan yang meliputi pajak dalam negeri serta kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp 24,42 triliun atau 19,73% dari target. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga

menunjukkan kinerja kuat dengan realisasi sebesar Rp2,02 triliun, setara 35,63% dari target tahunan,” ucapnya.

Belanja realisasi APBN terdiri atas Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 6,44 triliun atau 18,85% dari pagu. Selain itu, ada Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp19,90 triliun atau 28,29%.

“Keseimbangan antara penerimaan dan belanja ini memperkuat peran APBN. Khususnya, sebagai instrumen fiskal yang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tengah tantangan global,” tuturnya.

Sementara, untuk kinerja APBD Jawa Tengah hingga akhir Maret 2025 juga menunjukkan progres yang positif. Pendapatan Daerah berhasil terealisasi sebesar Rp25,69 triliun atau 22,72% dari target, sementara Belanja Daerah Rp 13,70 triliun atau 11,89% dari pagu.

“Porsi terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hingga akhir Maret 2025, kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD mencapai Rp 19,9 triliun, atau 77,49% dari total realisasi pendapatan,” ujar Bayu.

Angka itu kembali menegaskan peran krusial dukungan fiskal pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah. Termasuk, dalam penyediaan layanan publik esensial bagi masyarakat Jawa Tengah.